

JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS  
Vol. 7 No. 2/ September 2007

## STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

WIDIA ASTUTY  
(Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)

### ABSTRAK

Prinsip dasar dari model ekonomi kapitalis adalah kepemilikan pribadi dengan value dasar adalah pemupukan kesejahteraan untuk pribadi dilindungi oleh undang-undang. Dampak yang paling jelas adalah kesenjangan. Bentuk yang paling nyata adalah polarisasi yang timpang antara mereka yang sangat sejahtera yang berjumlah sedikit dan sisanya yang tidak sejahtera. Pembangunan pada masa awal (1970-1980an) menghasilkan kesenjangan yang mengkhawatirkan. Pemerintah berusaha mengimbangi dengan mekanisme subsidi bagi mereka yang tidak sejahtera (atau tidak mampu menikmati pembangunan) dan konsep Pembangunan Berbasis Rakyat sebagai mekanisme menyelamatkan "residu" pembangunan.

*Keyword : Strategi, Penanggulangan Kemiskinan, Subsidi*

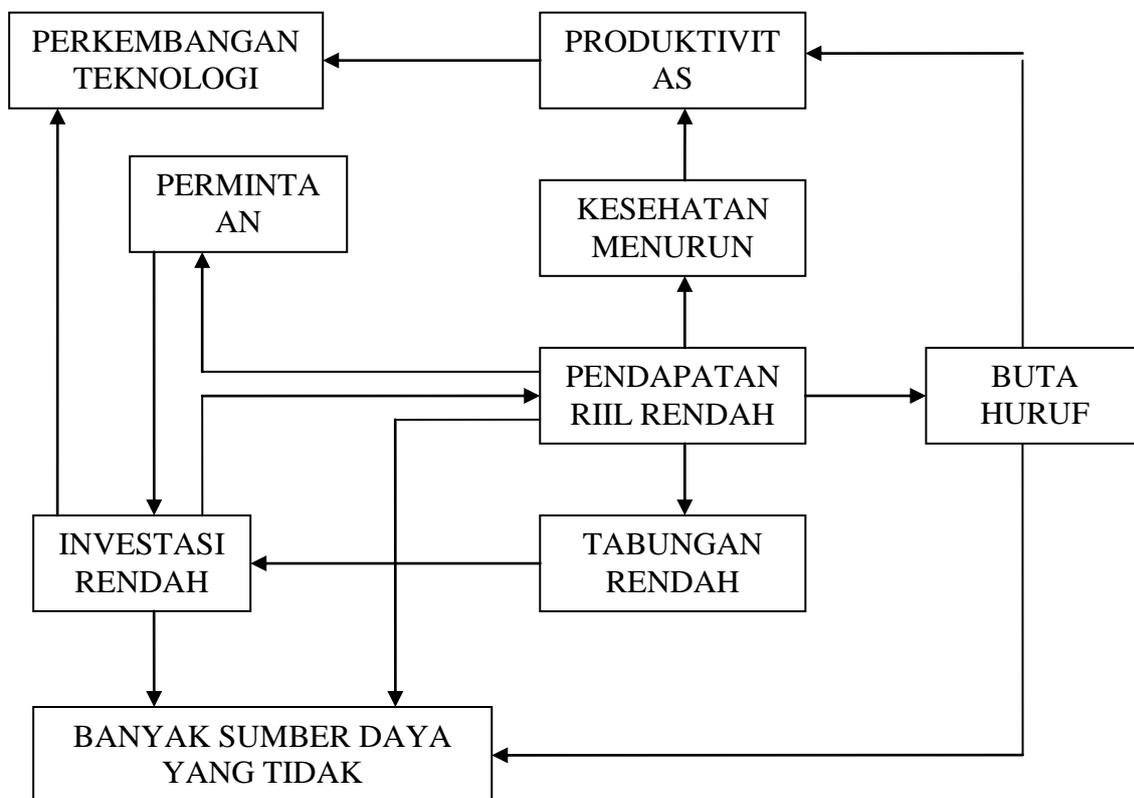
### Pendahuluan

Konsep dan kondisi kemiskinan sering dicampuradukkan serta dianggap sama dengan konsep dan kondisi Keterbelakangan. Padahal dua hal tersebut merupakan konsep yang berbeda. Keterbelakangan (under-development) adalah suatu proses dialektik (proses sebab akibat). Kemiskinan (poverty) tidak perlu atau tidak dengan sendirinya menyebabkan keterbelakangan. Namun sebaliknya, keterbelakangan acapkali mendorong munculnya kemiskinan (T. May Rudi, 2007: 86).

Negara-negara berkembang identik dengan negara miskin. Di negara seperti ini pekerjaan utama pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan. Namun, seperti dicatat oleh Kunarjo (2000, 2-3), mengikuti Ragnar Nurske, kemiskinan di negara berkembang ibarat lingkaran setan, karena berbagai penjelasan kemiskinan tidak banyak menjelaskan "kenapa mereka menjadi

miskin". Dikatakan Kunarjo bahwa dalam lingkaran setan kemiskinan, pokok pangkal kemiskinan adalah pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah bukan hanya mempengaruhi tingkat tabungan yang rendah, tetapi juga mempengaruhi tingkat pendidikan, dan kesehatan yang rendah sehingga produktivitas sumber daya yang ada juga menjadi rendah. Semuanya ini akan mempengaruhi pendapatan masyarakat yang rendah pula (Kunarjo, 2000, 3). Dalam skema, lingkaran setan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Lingkaran Kemiskinan**



*Sumber : Kunarjo, 2000, 4, dimodifikasi*

Salah satu strategi yang paling banyak dipakai, paling digemari—mulai birokrasi sampai LSM—adalah subsidi untuk masyarakat miskin. Strategi ini dapat dikatakan muncul sejak John Maynard Keynes memberikan advis kepada pemerintahan Amerika yang dilanda depresi besar pada tahun 1930an. Salah satu

pemikiran Keynes—yang bahkan banyak disebut sebagai corenya—adalah pengambilan posisi yang berseberangan dengan kaum klasik yang mengandaikan ekonomi akan tumbuh dan berkembang dengan sendirinya karena ada "tangan-tangan tak nampak" yang bernama kepentingan pribadi. Anjuran pokoknya sebenarnya tidak langsung mengarah kepada subsidi kepada orang miskin namun menekankan pentingnya intervensi pemerintah untuk menjadi aktor ekonomi ketika keadaan menjadi sulit dan mekanisme invisible hand tidak malfunction.

Gagasan intervensi pemerintah di dalam pembangunan (sebagai besaran dari perekonomian) yang dianjurkan oleh Keynes dan ekonom yang sealiran menggerakkan sebuah konsep negara yang baru, yaitu welfare state. Sebelumnya negara praktis hanya bertugas sebagai watchdog alias anjing penjaga, sementara individu-individu usahawan (baca: kapitalis) beroperasi nyaris tanpa regulasi. Negara- Kesejahteraan digerakkan salah satunya oleh pemikiran Keynes, sebagaimana ia juga menggerakkan pembentukan Bank Dunia dan IMF sebagai bagian dari strategi welfare-world-state.

Konsep dasar dari negara kesejahteraan adalah mengambil dari yang mereka berlebih untuk membagi dengan mereka yang kekurangan. Mulailah dikenal istilah "subsidi". Konsep ini bahkan masuk menjadi bagian dari mekanisme Marshall Plan sebagai subsidi untuk memulihkan Eropa yang hancur sebagai akibat Perang Dunia II. Konsep Negara Kesejahteraan ini dekat dengan konsep ekonomi-sosialistik (bukan komunistik) yang diadopsi oleh ekonom terkemuka Indonesia pada masa kemerdekaan yaitu Mohammad Hatta.

Hatta adalah figur yang membangun pondasi ekonomi Indonesia dalam koridor ekonomi sosialistik, atau dalam bahasa yang berbeda adalah welfare-state-model. Ekonomi harus dikelola dengan keadilan. Bedanya, jika ekonomi sosialistik mengedepankan peran proaktif (atau lebih dari aktif) dari negara di dalam membangun keadilan ekonomi, sementara negara-kesejahteraan mengedepankan peran negara secara pasif-dan-aktif dalam membangun keadilan ekonomi.

Di dalam perkembangannya, konsep negara kesejahteraan menjadi pilihan dari pembangunan Indonesia, khususnya pada era Orde Baru (era Presiden Soeharto). Pilihan ini dengan sadar dilakukan karena orientasi pengambil kebijakan publik pada saat itu sangat Amerikanis daripada Eropa (Barat) sentris. Basis dari kebijakan ini adalah melegitimasi kapitalisme sebagai basis ekonomi, namun memiliki mekanisme untuk melunakkan dampak kapitalisme dalam bentuk subsidi.

Subsidi menjadi katup penyelamat pembangunan Orde Baru. Beberapa subsidi yang menyolok adalah:

1. Subsidi kredit mikro, baik melalui perbankan maupun melalui birokrasi
2. Subsidi pendidikan
3. Subsidi kesehatan
4. Subsidi BBM, dan
5. Subsidi pertanian

Model ekonomi Orde Baru boleh saya istilahkan dengan model ekonomi kapitalis yang diimbangi dengan subsidi bagi mereka yang dipinggirkan dengan ekonomi kapitalis.

Pendekatan subsidi di era tersebut dapat dinilai cukup efektif dari ukuran populasi penduduk miskin. Pada tahun 1996 dilaporkan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tinggal 14% dan terdapat kecenderungan menurun.

Namun, ternyata biang kejatuhan pembangunan Orde Baru adalah subsidi juga. Dengan merosotnya pendapatan pemerintah, merosot pula kapasitas pemerintah untuk memberikan subsidi, dan merosot pula kredibilitas pemerintah. Asumsinya sederhana, pertumbuhan ekonomi yang cepat meninggalkan kesenjangan, dan kesenjangan dapat dipelester dengan subsidi. Padahal, "luka" itu adalah "luka permanen" bukan lecet-lecet. Ketika "plester" subsidi dibuka (dicabut) luka itu menganga dan menghasilkan eksplosi politik yang menjadi salah satu bahan bakar dari krisis sosial-politik domestik di tahun 1998.

Hari ini kita membahas kembali tentang subsidi bagi masyarakat miskin. Untuk mendapatkan sebuah rekomendasi yang optimal, maka perlu dipahami pergeseran paradigma pembangunan hari ini, dan bagaimana subsidi seharusnya ditata, serta bagaimana kebijakan penanggulangan kemiskinan dibuat dan diselenggarakan.

## **II. Pergeseran-Pergeseran**

Lesther Thurow (1999) dalam penelitiannya menemukan bahwa hari ini persaingan tidak lagi antara kapitalis dengan sosialis namun antara Kapitalisme Amerika dengan Kapitalisme Cina dengan Kapitalisme Jepang dengan Kapitalisme Jerman dan seterusnya. Apa artinya? Sosialisme sudah mati. Robert Heilbroner (1995), filsuf modern Amerika, mempostulasikan bahwa satu-satunya sistem yang bertahan dan terus akan bertahan adalah kapitalisme.

Robert Heilbroner menyebut ada tiga alasan kenapa kapitalisme menjadi pilihan tunggal dan tak tergantikan hari ini dan di masa depan, menggunakan mekanisme pasar, bisa dipakai dalam kegiatan ekonomi pemerintah maupun individu masyarakat, dan memberi ruang luas bagi ekspansi kapital. Bahkan ia menambahkan kekuatan inti dari kapitalisme adalah ia memberi ruang gerak yang paling luas bagi perubahan. Lebih ekstrem lagi, David Boaz (1997), Wakil Presiden the Cato Institute mendapatkan temuan bahwa telah bangkit kembali Libertarianisme.

Fakta paling nyata dari hadirnya sistem kapitalisme sebagai sistem ekonomi global adalah rontoknya negara-negara yang menganut ekonomi sosialis-komunis (khususnya Blok Timur) dan bangkitnya negara-negara yang menganut ekonomi kapitalis (khususnya kapitalis murni seperti Amerika Serikat, Inggris, Hongkong, Singapura). Bahkan kemajuan Cina (RRC)—yang berideologi komunis tetapi menjalankan praktek kapitalis—semakin memberikan pembuktian bahwa kapitalisme menjadi pemenang dan bahkan menjadi sistem ekonomi tunggal bagi perekonomian global, regional, nasional, bahkan lokal.

Apa artinya? Ekonomi-ekonomi yang kita kenal dan kita praktekan sebelum ini, yaitu ekonomi sosialis dan ekonomi negara-kesejahteraan digeser oleh kapitalisme dan liberalisme. WTO, GATT, APEC, AFTA, privatisasi BUMN, dan kebijakan penghapusan berbagai subsidi di negara-negara berkembang adalah fakta baru yang nyata, yang sekaligus kita takut untuk melihat dan mengakui kehadirannya. Kebijakan Propenas untuk menghapus subsidi BBM pada tahun 2004 adalah salah satu bukti bahwa pemerintah pun dengan sadar mengadopsi apa yang disebut Boaz sebagai Neo-Libertarianisme.

Di dalam kondisi seperti ini tiba-tiba kita berhadapan dengan isu subsidi. Sebuah isu yang mendadak sulit diterima relevansinya di dalam paradigma yang terlanjur disepakati oleh umat manusia di dunia dan juga Indonesia. Sama dengan kebingungan kita memasukkan pasal tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berakar pada paradigma Welfare-State yang sudah jauh ditinggal, namun dimasukkan dalam Amandemen UUD 1945. Bagaimana kita harus meletakkan diri, bagaimana kita memilih pembenaran, dan pertanyaan sejenis menjadi lebih penting daripada bagaimana agar subsidi tepat sasaran. Pertanyaan-pertanyaan strategis mendadak menjadi lebih penting daripada pertanyaan-pertanyaan teknis.

### **III. Subsidi**

Salah satu asumsi paling penting dari subsidi di dalam khasanah pembangunan Indonesia adalah karena di Indonesia pembangunan menyisakan teramat banyak penduduk yang tidak sejahtera atau miskin. pada tahun 1998 nilai rupiah dan saham di Indonesia merosot sampai 80%. Akibatnya sangat menyolok: paritas daya beli secara global hancur ditambah dengan ambruknya ratusan ribu perusahaan, mulai konglomerat hingga usaha rumahan, dengan dampak melejitnya pengangguran.

Indonesia menjelang abad 21 ibarat didepak dari surga. Pujian The Asian Economic Miracle dari Bank Dunia ternyata omong kosong. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, Indonesia menjadi salah satu negara miskin di dunia dengan pendapatan per kapita sekitar US \$ 350 -dari US \$ 1,100. Prosentase penduduk miskin pada tahun 1998 sama dengan di tahun 1970, yakni sekitar 40%. Pembangunan selama

32 tahun seakan tidak ada gunanya. Namun, kemiskinan di Indonesia bukanlah disebabkan oleh lemahnya kelembagaan dan infrastruktur ekonomi, namun karena adanya instant bankruptcy yang menciptakan pengangguran dalam jumlah sangat besar dalam waktu seketika, sementara proses pemulihan memerlukan waktu yang cukup panjang.

Pemerintah melakukan program penanggulangan kemiskinan Jaring Pengaman Sosial yang mengadopsi dari strategi yang dipakai Amerika ketika mengatasi malaise tahun 1930an. Program-program subsidi pun semakin intensif, baik dari pemerintah maupun donor, baik dalam bentuk hibah maupun pinjaman (lunak). Pada bulan Agustus tahun 2001, pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Megawati membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (Keppres No. 124 Tahun 2001 jo. No. 8 Tahun 2002 jo. No. 34 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan) dengan tujuan menurunkan penduduk miskin dari 19% menjadi 17%. Berbagai-bagai subsidi mengucur kembali, mulai yang bersifat pendukung hingga penggerakan ekonomi melalui berbagai kredit untuk kelompok miskin (beberapa subsidi yang diidentifikasi antara lain: P4K, Karya Usaha Mandiri dan Mitra Usaha Mandiri, PEMP, PPK, PKP-Ketahanan Pangan, IDT dan PDM-DKE, KUT, Takesra/Kukesra, JPS, PUKK, Beras Miskin, PMT-AS).

Di sini kembali lagi konsep subsidi mengemuka dan mau-tidak-mau menjadi relevan bagi Indonesia, tidak peduli kita sudah mengadopsi libertarian-kapitalisme. Namun demikian, yang menjadi isu pokok adalah ternyata banyak temuan yang mengidentifikasi bahwa subsidi banyak yang tidak sampai kepada sasaran, diselewengkan, dan lain-lain, dengan salah satu indikator tidak beranjaknya secara signifikan keakutan kemiskinan di Indonesia.

Subsidi memang mempunyai tujuan mulia menolong mereka yang tertinggal, namun hanya menjadi lelucon publik apabila pada akhirnya menjadi bagian dari korupsi di lingkungan penyelenggara subsidi. Masalahnya, subsidi memang sangat rentan terhadap korupsi dan penyelewengan lainnya. Oleh karena itulah, sejak awal, Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) sudah menggariskan bahwa subsidi

bukanlah menjadi satu-satunya bagian pokok dalam strategi penanggulangan kemiskinan nasional.

Pernyataan resmi dari KPK mengemukakan bahwa kemiskinan hanya dapat diperangi secara efektif dari dua sisi:

1. peningkatan pendapatan kelompok miskin
2. penurunan pengeluaran kelompok miskin

Peningkatan pendapatan kelompok miskin ternyata tidak harus dilakukan dengan pemberian subsidi kredit usaha. Dari hasil diskusi dengan para pelaku usaha keuangan, baik bank umum maupun BPR, menunjukkan bahwa bagi masyarakat miskin, kredit murah dalam arti di bawah bunga pasar bukanlah inti permasalahan. Justru inti dari inti permasalahan adalah akses kredit. Praktek yang dijalankan oleh mekanisme perbankan dengan memberikan pinjaman dengan suku bunga pasar untuk peminjam mikro (30-50%) masih ekonomis. Bahkan, para pemberi pinjaman individual memberikan pinjaman lebih dari bunga pasar, namun pelaku ekonomi mikro tersebut masih mampu survive bahkan sebagian besar justru berkembang .

Justru pengalaman menunjukkan, kredit bersubsidi untuk usaha adalah kredit yang paling banyak macet dan diselewengkan. Pengalaman BRI menunjukkan bahwa perubahan paradigma dari bank yang menyalurkan kredit bersubsidi menjadi kredit bermekanisme pasar tidak membuat peminjam mikro lari, bahkan mereka semakin bertambah banyak dan semakin berkembang (Djokosantosa Moeljono, 2001). Sementara itu, justru kredit bersubsidi yang disalurkan oleh berbagai program malah macet—termasuk KUT. Bahkan kredit bersubsidi di Bangladesh, melalui Grameen Bank, pun mulai dililit kondisi non performing loan yang cukup mencemaskan.

Pengalaman yang ditemui di lapangan, kemacetan terjadi karena tiga alasan pokok (Riant Nugroho, 2003: 222), yaitu:

1. pemberi kredit dari berbagai instansi, tetapi penerimanya sama
2. saling mematikan, karena bunganya berbeda, demikian pun ada kebijakan "pemutihan"

3. tidak mendidik pemberi dan penerima untuk bertanggung-jawab atas kredit tersebut

Salah satu kenyataan yang pahit adalah bahwa sebagian besar para pemberi kredit bersubsidi tersebut tidak kompeten dalam hal perkreditan dan pengembangan usaha. Pada saat ini begitu banyak departemen dan badan memiliki skema kredit bersubsidi untuk masyarakat miskin. Bagaimana mungkin birokrasi yang core mission dan core competencinya adalah melakukan pelayanan publik menjadi organisasi keuangan/perbankan. Masalah ini melahirkan dua isu baru: patologi birokrasi dan bad governance.

Patologi birokrasi adalah birokrasi yang sehat menjadi berpenyakitan karena masuk ke wilayah kerja yang bukan menjadi bidang kerja dan kemampuannya. Secara akademis, pemberian kredit bersubsidi yang dilakukan berbagai lembaga pemerintahan tadi masuk dalam patologi birokrasi. Dalam tingkat tertentu, kegiatan ini rentan untuk diselewengkan menjadi "proyek". (Istilah proyek berkonotasi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Istilah politiknya adalah "korupsi").

Bad governance adalah istilah yang mempermudah kita untuk menilai praktek yang berlawanan dengan good governance. Good governance berintikan tiga hal: transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Alangkah sulitnya ketiga hal tadi diterapkan jika kegiatan tersebut sudah "diprojekkan".

Jadi, dalam hal income generating scheme harus dihapuskan kredit bersubsidi, terlebih yang disalurkan tidak melalui mekanisme perbankan. Kebijakan pada saat ini dinilai sudah pada tempatnya yaitu meminta setiap perbankan untuk memberikan komitmen kredit untuk penanggulangan kemiskinan, dan memastikan bahwa penyalurannya seperti yang disasar dalam program penanggulangan kemiskinan nasional. Apabila pemerintah hendak memberikan tambahan kredit—termasuk melalui kompensasi BBM dan stimulus ekonomi—disarankan agar hanya dilewatkan mekanisme perbankan. Itu pun diharapkan agar kredit yang diberikan tidak kredit bersubsidi. Tugas dari pemerintah—bersama pemerintah daerah (Komite Penanggulangan Kemiskinan daerah)—adalah

memastikan alokasi kredit tersebut memang sampai ke target. Pada saat ini pemerintah telah memilih strategi yang efektif dalam bentuk mendorong pembentukan UKM Center di setiap kawasan untuk membawa para pelaku mikro agar menjadi pelaku ekonomi yang bankable dan memperoleh akses kredit perbankan. Salah satu agenda yang sedang dibicarakan adalah mendirikan Lembaga Penjamin Kredit bagi pengusaha mikro ini. Alternatif ketiga adalah mendorong pelaku ekonomi yang mikro yang berada di bawah skala usaha untuk bergabung membentuk usaha baru yang mempunyai skala ekonomi yang sesuai—economic-sizing usaha mikro.

Strategi umumnya tidaklah memberikan injeksi kapital kepada pelaku ekonomi di kawasan tersebut, melainkan memberikan injeksi management value and know how. Pada saat ini kita menyaksikan matinya sentra-sentra industri mikro seperti Tanggulangin di Sidoarjo dan Cibaduyut di Bandung Strategi yang dipilih adalah memberikan kredit untuk mendorong perluasan usaha, namun tidak diimbangi kecakapan mengelola usaha. Berbeda dengan usaha mikro di kawasan Majalengka yang relatif bertahan dan maju karena didukung oleh kelompok usaha Astra International yang tidak sekadar menginjeksi modal, namun juga kecakapan manajerial.

Strategi kedua dari penanggulangan kemiskinan nasional adalah menurunkan pengeluaran kelompok miskin. Di sinilah subsidi dapat berperan secara efektif, karena ruang lingkup yang dikerjakannya tidak berada di ranah income generating. Wilayah-wilayah yang dicakup dalam subsidi adalah:

1. pendidikan
2. kesehatan

Sektor-sektor pendukung yang dapat dimasukkan dalam skema subsidi di luar kedua sektor tersebut adalah:

1. transportasi umum massal
2. energi untuk masyarakat miskin—khususnya energi listrik dan bahan bakar

Ada beberapa pendapat yang menyatakan agar infrastruktur pendukung dimasukkan dalam subsidi, seperti:

1. jalan
2. jembatan
3. tanggul/bendungan
4. irigasi
5. kantor

Sebaiknya kegiatan pembangunan infrastruktur perlu dikeluarkan dari kegiatan penanggulangan kemiskinan, karena kegiatan ini memang tidak fokus kepada penanggulangan kemiskinan, kecuali jika dimasukkan dalam skema Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang hanya layak dilaksanakan pada masa-masa awal krisis yang akut dan kurang relevan dilaksanakan ketika keakutan mulai dapat diredam.

Agenda pentingnya adalah bagaimana subsidi mengena kepada sasaran dan masuk dalam kerangka good governance. Agenda ini menjadi sebuah agenda teknis yang dapat dibantu dengan menyusun sebuah rangkaian pekerjaan, yaitu:

1. tentukan tujuan subsidi
2. tentukan kriteria target sasaran subsidi
3. susun mekanisme pemberian subsidi yang transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan
4. temukan target yang sesuai dengan kriteria
5. berikan subsidi
6. kendalikan (jangan sekadar monitoring) mekanisme pemberian subsidi

#### **IV. Rekomendasi**

Kebijakan penanggulangan kemiskinan telah dicanangkan sejak 2001, yaitu meningkatkan pendapatan kelompok miskin dan menurunkan pengeluaran kaum miskin. Strategi yang digunakan tidaklah lagi semata-mata dengan subsidi. Pendekatan income generating seyogyanya tidak lagi dilakukan oleh lembaga pemerintah, melainkan oleh lembaga perbankan atau lembaga non-pemerintah yang tidak menggunakan dana APBN/D.

Alasan pokoknya bukanlah bahwa kita harus mengikuti paradigma liberalis-kapitalis yang anti-subsidi, namun karena apapun paradigma yang menjadi mainstream pembangunan, bagi Indonesia, kepincangan sebagai akibat pembangunan dalam bentuk besarnya jumlah masyarakat miskin adalah the real problem, bukan sekadar angka-angka atau wacana. Namun demikian, penanggulangan kemiskinan tidaklah efektif diselesaikan dengan cara subsidi. Secara politis, memang subsidi lebih menguntungkan untuk diusung, misalnya dengan model komparasi berapa biaya untuk rekapitalisasi perbankan dan berapa biaya untuk rekapitalisasi kelompok miskin.

Kemiskinan harus diperangi tetapi dengan cara yang cerdas dan bijaksana. Cerdas karena pemecahan mengena langsung kepada inti permasalahan, bukan ke pinggiran-pinggiran permasalahan-annya. Bijaksana karena pemecahan masalah tidak menciptakan masalah baru.

Penanggulangan kemiskinan perlu menjadi mainstream dari pembangunan, namun kita juga perlu menyadari bahwa kita juga sedang berada di dalam global mainstream yaitu kapitalis-liberalis. Catatan pentingnya adalah bagaimana kita memanfaatkan arus global tersebut. Untuk itu, proposisi yang diajukan adalah:

1. Penanggulangan kemiskinan harus bersifat membebaskan kelompok miskin untuk dapat menolong diri sendiri, sehingga pendekatannya adalah pemberdayaan kelompok miskin sebagai asumsi paling dasar, bukan pendekatan karitas (atau sinterklas). Karena itu, apapun strategi penanggulangan kemiskinan yang dipilih tidak boleh mematikan mekanisme atau kelembagaan lokal yang sebelumnya beroperasi sebagai mekanisme social-economic safety net. Salah satu strateginya adalah mendesentralisasikan penanggulangan kemiskinan.
2. Memasukkan prinsip pengelolaan (manajemen) dan persaingan (kompetisi) sebagai basis pengembangan kelompok miskin, khususnya dalam peningkatan pendapatannya.
3. Income generating policy sepatutnya diletakkan di dalam “mekanisme pasar” dan dengan fokus kepada peningkatan kemampuan mengembangkan dan memanajemeni usaha dari masyarakat dan penyelenggarannya didesentralisasikan

4. Subsidi hanya dapat diberikan dalam konteks untuk pendidikan dan kesehatan plus transportasi umum massal dan energi untuk kelompok miskin
5. Program-program infrastruktur, khususnya yang berskala besar, seyoganya dimasukkan di dalam pos pembangunan infrastruktur
6. Akhirnya, rekomendasi umum dalam penanggulangan kemiskinan adalah para pihak terkait di dalam penanggulangan kemiskinan, khususnya lembaga pemerintahan untuk konsisten mengikuti arah penanggulangan kemiskinan nasional yang dirumuskan oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK), dan melaksanakan sesuai dengan misi dan kompetensi-inti dari masing-masing lembaga.

## Daftar Pustaka

- Keynes, John Maynard. 1957. *The General Theory of Employment Interest and Money*. London: MacMillan &Co.
- Keppres No. 124 Tahun 2004 jo 8 Tahun 2002 jo No. 34 Tahun 2002 tentang Komite Penanggulangan kemiskinan.
- Kunarjo. 2000. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Lesther Thurow. 1999. *Creating Wealth: The new Rules for Individuals, Companies and Countries in a Knowledge-Based Economy*. London: Nicholas and Brealey.
- Riant Nugroho D. 2003. *Reinventing Pembangunan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- T. May Rudi. 2007. *Ekonomi Politik Internasional*. Bandung: Nuansa.